







LKS Al-Yasini menyediakan produk-produk penghimpunan dan pembiayaan seperti lembaga keuangan syariah pada umumnya. Termasuk pembiayaan *murābahah* juga ada di LKS Al-Yasini. Dalam praktiknya, pembiayaan *murābahah* di LKS Al-Yasini objek utamanya adalah uang bukan barang. Jika uang yang menjadi objek *murābahah* dikawatirkan menimbulkan riba, karena dalam Islam uang merupakan alat tukar bukan sebagai komoditas. Padahal prinsip utama dalam Lembaga Keuangan Syariah telah dijelaskan bahwa transaksi harus bebas dari riba.

Hal ini terbukti ketika nasabah datang untuk melakukan pembiayaan, nasabah langsung disodori formulir permohonan pembiayaan, dalam form tersebut tidak terdapat daftar kolom barang yang akan di beli oleh nasabah, seolah nasabah hanya melakukan peminjaman uang biasa yang akan digunakan untuk modal usaha, biaya sekolah anak, dan lain-lain dengan prosentase margin yang ditentukan secara pasti di awal. Setelah konfirmasi kepada Kepala dan Manajer Operasional LKS Al-Yasini, alasan tidak adanya barang yang nyata dalam pembiayaan *murābahah* adalah mereka mengikuti hujjah dari Dewan Syariah LKS Al-Yasini yang memperbolehkan jual beli uang kertas dengan uang kertas mereka mengistilahkan jual beli ini dengan nama *bay' al-awraq*, LKS mengaplikasikan salah satu pendapat ulama yang relatif simpel dan sederhana serta minim resiko yaitu pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli uang kertas dengan uang kertas, dengan catatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki tujuan transaksi pada dzat (bendanya uang tersebut) sebagai komoditas, bukan nilai yang

tersimpan didalamnya. Misalnya Rp. 100.000,- kontan dibeli dengan harga 110.000,- tempo.

Dewan Syariah LKS Al-Yasini mengeluarkan *hujjah* tentang bertransaksi di LKS Al-Yasini yang mana *hujjah* tersebut tidak mengikuti fatwa DSN MUI khususnya dalam hal pembiayaan *murābahah*. Manager operasional LKS Al-Yasini mengakui bahwa Dewan Syariahnya dalam membuat *hujjah* tidak mengikuti fatwa DSN MUI. Padahal semestinya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam suatu lembaga keuangan syariah yang menjadi wakil dari DSN bertugas mengawasi usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN.

Oleh karena itu seharusnya praktik pembiayaan *murābahah* di LKS Al-Yasini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mengacu kepada peraturan tentang *murābahah*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik pembiayaan *murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al-Yasini dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Hujjah Dewan Syariah Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini tentang Praktik Pembiayaan *Murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan”

































